



KPK Belum Tahan Puluhan Tersangka Kasus Korupsi

Jakarta, MIMBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan penahanan terhadap puluhan orang yang telah berstatus tersangka.

Hal tersebut jadi catatan tersendiri bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh 9 Desember hari ini. Catatan CNNIndonesia.com,

ada 43 orang tersangka yang belum ditahan KPK yang diduga terlibat di berbagai kasus tindak pidana korupsi.

Pertama, sebanyak 21 tersangka kasus dana hibah Pemprov Jawa Timur yang terdiri dari empat orang penerima suap dan 17 lainnya sebagai pemberi. Dari empat tersangka tersebut, tiga orang merupakan

penyelenggara negara. Satu lainnya ialah staf dari penyelenggara negara.

Sementara untuk 17 tersangka pemberi, sebanyak 15 di antaranya adalah pihak swasta dan dua lainnya penyelenggara negara.

Kemudian, empat tersangka kasus dugaan korupsi ASDP.

■ Bersambung ke Hal 11



Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengatakan momentum Hari Antikorupsi Sedunia 2024 bisa menjadi tonggak perubahan mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045.

Perpanjangan SIM Sengsarakan Rakyat



Jakarta, MIMBAR - Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K. Harman dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Korlantas Polri mengungkapkan proses perpanjangan SIM sangat menyengsarakan masyarakat. Hal ini tak lain karena pengurusannya yang membutuhkan waktu dan banyak biaya.

Benny mencontohkan salah satu kasus yang ditemuinya, di mana warga salah satu kabupaten di NTT harus mengurus perpanjangan SIM jauh-jauh ke Kupang sebab mesin cetak SIM di daerahnya mengalami kerusakan.

"Di daerah saya di NTT, provinsi kepulauan, untuk memperpanjang SIM saja harus datang ke Kupang. Ada SIM tertentu yang di kabupaten lah. Di

kabupaten saja susah, tiba-tiba mesin rusak, SIM tidak bisa diperpanjang," ujarnya dikutip dari YouTube.

"Lalu mereka yang tidak bisa memperpanjang SIM akibat mesin rusak tetap membawa kendaraan kemudian ditangkap dengan alasan SIM sudah mati," tambahnya.

■ Bersambung ke Hal 11



KISRUH KETUA UMUM PMI

JK Laporkan Agung Laksono ke Polisi

Jakarta, MIMBAR - Jusuf Kalla (JK) mengaku sudah melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkolan ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI). JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara.

■ Bersambung ke Hal 11



AS-Israel Syok Pemerintah Assad digulingkan

Warga Suriah yang berada di sejumlah kota di berbagai negara turun ke jalan. Mereka merayakan berakhirnya kekuasaan rezim Bashar al-Assad.



Medan, MIMBAR - Amerika Serikat dan Israel disebut terkejut melihat milisi Suriah berhasil menggulingkan rezim otoriter Bashar Al Assad pada Minggu (8/12) lalu hanya dalam 11 hari pemberontakan.

AS terkejut karena tidak menyangka kelompok pemberontak Suriah berhasil menjatuhkan rezim Assad tidak lama usai mereka merebut Kota Aleppo dan memperluas pemberontakan sejak akhir November lalu.

"Saya pikir semua yang terjadi mengejutkan mereka (AS). Banyak dari kami, para

analisis dan pengamat Suriah, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya," kata Qutaiba Idlbi, seorang peneliti senior di Atlantic Council yang berpusat di Washington DC kepada Al Jazeera.

"Saya merasa kejadian di lapangan berjalan terlalu cepat sehingga mereka tidak dapat mengajarnya, terutama dalam masa sidang yang tidak menentukan ini," lanjutnya.

Senada, Komunitas Intelijen Israel juga tidak menyangka kelompok

■ Bersambung ke Hal 11

Novel Baswedan Tanggapi Kasus Firli Bahuri

Polisi

WAKIL Kepala Satgasus Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan berharap kasus hukum yang menjerat eks Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri bisa segera diselesaikan kepolisian.

Kasus dugaan pemerasan Firli terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ditangani Polda Metro Jaya. Dalam kasus itu, Polda Metro telah menetapkan Firli sebagai tersangka lebih dari setahun yang lalu.

"Contohnya kasus tadi (Firli), ya kita sampaikan kita berharap semoga proses itu tidak lama-lama, tentunya semakin cepat prosesnya semakin tercapai juga tujuan hukum tadi," kata Novel di Gedung PTK, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Novel pun menyinggung soal pentingnya kolaborasi antarpengadilan dalam penanganan kasus ko-



rupsi. Sebab, kata dia, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya satu pihak saja. "Kita berharap semua penegak hukum mesti bersinergi. Karena upaya memberantas korupsi ini bukan tugas satu sisi saja, tapi tugas negara. Dan semuanya mesti harus berkolaborasi untuk bisa bekerja dengan lebih baik," tutur eks penyidik KPK tersebut.

Firli ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus pemerasan terhadap

eks Mentan Syahrul Yasin Limpo pada 22 November 2023 lalu. Dalam perkara ini, Firli diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup. Terhitung sudah satu tahun lebih Firli menyanggah status sebagai tersangka.

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

8 JUMADIL AKHIR 1446 H

Subuh : 04:59 WIB	Maghrib : 18:18 WIB
Zuhur : 12:20 WIB	Isya : 19:32 WIB
Ashar : 15:43 WIB	

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Impossible Hapus Perpanjangan SIM

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UINSU)



USULAN Komisi III DPR RI untuk menghapus istilah perpanjangan SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merupakan langkah yang menimbulkan beragam pendapat. Bahkan dapat dinilai sekedar mencari popularitas. Karena menurut hemat kami sangat sulit diterapkan.

Memang dari segi perspektif positif, hal itu tentu dapat menghilangkan proses perpanjangan dapat

■ Bersambung ke Hal 11

Soal Sertifikasi Pendakwah, Ketum Muhammadiyah: Sebaiknya Tidak Usah

Sebaiknya Tidak Usah

Jakarta, MIMBAR - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana sertifikasi pendakwah yang belakangan muncul perlu dikaji ulang. Bahkan, sambungnya, sebaiknya ditiadakan dan tak perlu direalisasikan.

"Dikaji secara matang, jangan langsung diputus. Bahkan, sebaiknya tidak," kata Haedar di sela menghadiri acara pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Senin (9/12).

■ Bersambung ke Hal 11



■ Jadi celah korupsi ...

■ Hehehe...

Segera Diselesaikan...

Dari Halaman 1

Namun, tak ada perkembangan yang berarti dalam proses penyidikan yang dilakukan Subdit Tipidkor Ditreskrimsub Polda Metro Jaya. Penyidik tercatat dua kali mengirim berkas perkara ke Kejati DKI Jakarta dan dua kali pula dikembalikan karena dinilai belum lengkap.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kini digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran tak kunjung merampungkan kasus tersebut.

Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) dan terdaftar dengan nomor 116/Pid. Pra/2024/PN JKT.SEL.

Teranyar, Polda Metro kembali memanggil Firlu untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Kamis (28/11). Namun, Firlu tak hadir memenuhi panggilan. Firlu malah menyurati Kapolri meminta agar kasus dugaan pemerasan terhadap SYL itu disetop. **(cnni/js)**



KRISIS PANGAN DI GAZA, RINTIH TANGIS ANTRE MAKANAN :

Krisis pangan yang berujung pada bencana kelaparan membuat anak-anak pengungsi Palestina di wilayah Khan Yunis, selatan Gaza harus ikut berjuang antre untuk mendapatkan makanan. Sejumlah anak-anak ikut berdesakan sambil menggenggam wadah untuk mendapatkan jatah makanan yang dibagikan di sebuah dapur umum. Sebelumnya, Program Pangan Dunia (WFP) mengeluarkan peringatan akan ancaman kelaparan yang tinggi di Gaza, terutama saat musim dingin tiba. (Foto Liputan6.com)

Hidayah

Impossible Hapus...

Dari Halaman 1

memangkas birokrasi yang sering kali dianggap berbelit. Pemilik kendaraan dan pengemudi tidak perlu report mengurus perpanjangan secara berkala.

Kemudahan bagi masyarakat, langkah ini dapat mengurangi beban administratif masyarakat yang sering kali harus meluangkan waktu khusus untuk mengurus perpanjangan SIM dan STNK.

Jika perpanjangan dihapus, biaya administrasi yang selama ini menjadi kewajiban masyarakat bisa berkurang, sehingga membantu meringankan pengeluaran warga.

Dari sudut tantangan dan kritik, perpanjangan SIM dan STNK sering kali dijadikan momen untuk memverifikasi kelayakan pengemudi (misalnya, tes kesehatan) dan kendaraan. Jika dihapus, pengawasan terhadap kondisi pengemudi dan kendaraan bisa menurun.

Dari segi dampak terhadap pendapatan negara bisa jadi penerimaan dari biaya administrasi perpanjangan SIM dan STNK merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Penghapusan ini perlu diimbangi dengan mekanisme lain untuk menutupi potensi hilangnya pendapatan tersebut.

Tanpa pembaruan berkala, ada kekhawatiran bahwa pengemudi yang tidak lagi memenuhi syarat kesehatan atau kendaraan yang tidak layak jalan tetap beroperasi, yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Jika ide ini ingin diterapkan, beberapa langkah alternatif bisa dipertimbangkan seperti mengintegrasikan pembaruan SIM dan STNK secara otomatis melalui sistem digital yang lebih efisien, tanpa perlu proses manual yang panjang.

Interval waktu perpanjangan bisa diperpanjang (misalnya, setiap 10 tahun sekali) agar tetap ada mekanisme pengawasan tetapi lebih ringan bagi masyarakat.

Jika perpanjangan dihapus, biaya administrasi bisa dimasukkan ke dalam pajak tahunan kendaraan secara terintegrasi untuk menutupi kehilangan pendapatan negara.

Usulan ini memiliki potensi untuk meringankan beban masyarakat, tetapi juga memunculkan tantangan dalam pengawasan keselamatan berkendara dan implikasi fiskal. Jika benar-benar diterapkan, pemerintah perlu memastikan ada mekanisme pengganti yang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi birokrasi, keselamatan publik, dan pendapatan negara.

Dalam perspektif teori komunikasi politik, usulan Komisi III DPR RI untuk menghapus perpanjangan SIM dan STNK dapat dianalisis melalui beberapa aspek, seperti proses komunikasi kebijakan, relasi kekuasaan, dan respon publik terhadap pesan politik.

Menurut teori agenda setting, keputusan ini dapat dilihat sebagai upaya para aktor politik (DPR RI) untuk membangun wacana publik tentang penyederhanaan pelayanan birokrasi. Dengan menyampaikan usulan ini,

mereka mencoba memposisikan isu penghapusan perpanjangan SIM dan STNK sebagai prioritas perhatian masyarakat.

Usulan tersebut dapat dimaknai sebagai strategi politik untuk mendapatkan dukungan publik dengan menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dalam hal efisiensi dan pengurangan beban administratif.

Dalam kerangka teori ini, media akan menjadi alat penting dalam menyebarkan usulan tersebut. Jika narasi yang digunakan efektif, usulan ini dapat diterima secara positif oleh masyarakat.

Teori framing menyoroti bagaimana suatu isu disampaikan agar menghasilkan interpretasi tertentu. Dalam konteks ini, usulan ini dapat dibingkai sebagai progresif dan reformis yakni menghapus birokrasi yang dianggap tidak efisien, sehingga menunjukkan keberpihakan pada rakyat.

Merakyat dapat membingkai kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat kelas menengah dan bawah yang sering kali terbebani biaya administrasi. Namun, framing ini juga dapat memunculkan kontra jika publik atau kelompok kritis memandang kebijakan ini melemahkan sistem pengawasan atau mengurangi pendapatan negara.

Dalam perspektif teori kritis, usulan ini dapat dianalisis dari sudut pandang kepentingan politik atau ekonomi yang mendasarinya.

Langkah ini dapat dilihat sebagai bentuk populisme, di mana politisi berusaha menarik simpati masyarakat melalui kebijakan yang terkesan "pro-rakyat."

Jika pendapatan negara dari perpanjangan SIM dan STNK hilang, perlu ditelusuri bagaimana pemerintah akan menggantinya, dan apakah ada potensi kepentingan tertentu di baliknya (misalnya, proyek digitalisasi baru).

Teori spiral of silence menyatakan bahwa respon masyarakat terhadap kebijakan ini dapat dipengaruhi oleh dominasi opini di ruang publik. Jika usulan ini diterima secara positif oleh mayoritas, individu yang tidak setuju cenderung diam karena takut tersisih dari opini umum. Sebaliknya, jika kritik terhadap usulan ini lebih dominan, penolakan akan semakin meluas.

Di era digital, respon terhadap kebijakan ini kemungkinan besar akan berkembang di media sosial. Pola diskusi yang muncul di media sosial dapat memengaruhi opini publik dan menentukan apakah usulan ini dianggap layak atau tidak.

Dalam komunikasi politik, usulan ini adalah contoh bagaimana aktor politik menggunakan isu kebijakan untuk memengaruhi opini publik dan membangun citra politik. Respon terhadap usulan ini akan sangat bergantung pada kemampuan aktor politik membingkai isu secara positif.

Sebagai sebuah wacana, keberhasilan usulan ini bukan hanya ditentukan oleh substansi kebijakannya, tetapi juga oleh efektivitas komunikasinya di ruang publik. **

KPK Belum...

Dari Halaman 1

Mereka ialah mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspawati; Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode Juni 2020-sekarang Harry Muhammad Adhi Caksono dan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi, dan Bos PT Jembatan Nusantara Group bernama Adjie.

Lalu tujuh tersangka kasus LPEI. Kasus ini merugikan keuangan negara sekitar Rp1 triliun ini. Namun, hingga kini identitas tersangka belum diumumkan secara resmi ke publik.

Kemudian, empat tersangka di kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Mereka ialah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita.

Beserta tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di Pemkot Semarang 2023-2024, dugaan

pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (9/12), tiga tersangka lainnya yaitu suami Ita yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri serta pihak swasta bernama Martono dan Rachmat.

Lalu, satu tersangka di kasus Situbondo yakni Bupati Situbondo Karna Suswandi, dan dua tersangka di kasus korupsi e-KTP yang salah satunya ialah Direktur Utama PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos yang hingga kini masih melarikan diri dengan menyandang status buron.

Kemudian, ada juga dua tersangka di kasus dugaan korupsi selter tsunami dan terakhir General Manager Hyundai Engineering and Construction Herry Jung yang jadi tersangka di kasus yang menjerat eks Bupati Cirebon

Sunjaya Purwadisastra.

Selain itu, KPK hingga saat ini juga tak kunjung membekuk dan menahan eks caleg PDIP Harun Masiku yang buron atas kasus korupsi suap sejak awal 2020 lalu.

Terakhir, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor juga belum juga ditangkap oleh KPK. Sahbirin sempat menjadi tersangka namun tidak ditahan. Ia kemudian menggugat penetapan tersangka itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menang.

Sementara itu juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut puluhan tersangka itu akan ditahan saat berkas mereka menjelang lengkap atau saat penghitungan kerugian negara sudah selesai bagi perkara pasal kerugian negara.

"Untuk itu, penyidik saat ini melengkapi alat bukti yang ada dan juga menunggu hasil PKN dari lembaga yang melakukan PKN dimaksud," kata Tessa. **(cnni/js)**

Perpanjangan SIM...

Dari Halaman 1

Menanggapi hal tersebut, Benny mengusulkan dua poin penting yang dapat dikaji oleh Korlantas Polri, yaitu berkaitan dengan penghapusan perpanjangan SIM mulai tahun depan dan penerapan audit terkait perpanjangan SIM, termasuk pada pengusaha yang mencetak kartu SIM.

"Sekali lagi saya mengusulkan untuk dimasukkan dalam kesimpulan (rapat), dua soal penting ini. Persoalan pertama hapus perpanjangan SIM dan STNK mulai tahun anggaran 2025. Kesimpulan yang kedua lagi, audit. Panggil itu pengusaha (cetak SIM)-nya," jelasnya.

Dari Halaman 1

"Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu," kata JK di sela-sela munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (9/12).

JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar AD/ART.

Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain.

"Itu kebiasaan Bapak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan," ujar JK.

Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai ketua umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri

Usulan SIM Seumur Hidup

Sebelumnya dalam rapat yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengusulkan penerapan SIM, STNK, dan TNKB seumur hidup, seperti yang telah diberlakukan pada KTP.

"Saya pernah usulkan agar perpanjangan SIM, STNK, TNKB ini cukup sekali saja seumur hidup. Seperti KTP, supaya tidak membebani masyarakat," ujar Sarifuddin, dikutip dari YouTube CNN Indonesia.

"Karena ini kan hanya untuk kepentingan vendor ini. Ini selebar SIM, ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa tapi biayanya sangat luar biasa, dan itu dibebankan

JK Laporkan...

sebagai petahana.

Agung menyatakan telah memenuhi seluruh syarat untuk maju mengikuti pemilihan calon ketua umum PMI 2024-2025 seperti, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak rangkap jabatan, hingga bersedia menyediakan waktu dan tenaga untuk kepentingan dan kemajuan organisasi.

Selain itu Agung mengklaim telah mengantongi 20 persen dukungan dari seluruh peserta yang akan hadir dalam munas sebagai syarat maju sebagai calon ketua baru PMI.

Di sisi lain, Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024 juga telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai ketua umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai ketua umum hari ini.

JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. "Itu ilegal dan pengkhianatan," kata JK.

JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024

Sebaiknya Tidak...

Dari Halaman 1

Sertifikasi pendakwah ini mencuat setelah kontroversi pendakwah yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman ramai diperbincangkan publik.

Miftah disebut sudah mengolok-olok pedagang es teh dalam sebuah pengajian, kemudian juga viral ketika dia melakukan hal sama terhadap seniwati senior Suyati alias Yati Peseh.

Dari Halaman 1

pemberontak Suriah berhasil menggulingkan rezim Assad yang sudah berkuasa 50 tahun dalam waktu singkat. Meski begitu, Israel juga khawatir akan keberadaan kelompok pemberontak Suriah yang telah berhasil menggulingkan

Setelah bertubi-tubi tekanan publik, Miftah sudah mengumumkan akan mundur dari jabatan utusan khusus presiden.

Haedar mengatakan, wacana sertifikasi pendakwah itu harus dibahas secara matang lebih dulu. Ia tak mau hal itu direalisasikan secara gegabah hanya karena satu atau dua kasus saja.

"Sebaiknya segala hal dibahas dan diputuskan secara matang jangan karena satu dua kasus, lalu kita pilihannya verbal," ucapnya.

Menurut Haedar daripada sertifikasi pendakwah, hal yang paling penting adalah

AS-Israel Syok...

Assad. Israel khawatir mereka bakal melakukan tindakan yang lebih parah di kemudian hari.

Sebelumnya, kelompok pemberontak Suriah berhasil menguasai ibu kota Damaskus dan menggulingkan rezim otoriter Presiden Bashar Al Assad pada Minggu (8/12).

Usai digulingkan oleh warga Suriah, Assad

kepada masyarakat," ujarnya lagi.

Sarifuddin mengusulkan jika terjadi pelanggaran berkendara, SIM hanya perlu dilubangi sebagai tanda. Setelah mencapai limit tertentu kepemilikannya bisa dicabut.

"Kalau terjadi pelanggaran cukup dibolongi aja, tiga kali dibolongi sudah. Tidak perlu lagi sekian tahun bisa mendapatkan lagi SIM," tambahnya.

Sarifuddin juga meminta pada Korlantas untuk mengkaji persoalan ini dan melakukan evaluasi.

"Jadi jangan ada perpanjangan gitu lho, supaya meringankan beban masyarakat yang dalam kondisi yang sangat susah seperti saat ini," tutupnya. **(cnni/js)**

sudah sepakat mengaklamasi dirinya.

Respon Agung Laksono

Politikus Senior Golkar Agung Laksono mengaku tidak masalah dilaporkan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) ke polisi buntut manuver dalam pencalonan Ketua PMI.

Agung mengatakan yang dilakukannya bukan tindak pidana atau kriminal.

"Boleh-boleh saja, semua orang boleh, lapor-lapor itu kan boleh saja, karena ini kan masalahnya bukan masalah pidana, bukan masalah kriminal. Ini kan masalah organisasi lah, organisatoris. Ya silakan aja, enggak apa-apa," kata Agung saat dihubungi, Senin (9/12).

Agung mengklaim apa yang dilakukannya bukan untuk merusak organisasi, namun untuk memperbaiki organisasi.

"Iya enggak masalah. Soalnya kita untuk memperbaiki kok bukannya untuk merusak," ujar Agung. **(cnni/js)**

bagaimana pemuka agama dan elite bangsa Indonesia bisa mencontohkan sifat teladan ke masyarakat.

Bukan, sindirnya, justru membawa agama menjadi bagian konsumsi hiburan atau entertainment.

"Yang paling penting justru baik seluruh elite agama maupun elit bangsa bisa menjadi teladan. Maka karena itu kami berharap bahwa, agama itu bisa menjadi suluh kehidupan, bukan menjadi entertainment dalam kehidupan kita," kata dia. **(cnni/js)**

kini melarikan diri ke Rusia. Ia terbang ke Moskow guna meminta suaka politik kepada Presiden Vladimir Putin. Saat ini, Rusia dilaporkan juga sudah memberi suaka politik kepada Assad. Suaka ini diberikan sebagai bentuk solidaritas mereka terhadap Suriah yang sudah terjalin sejak lama. **(cnni/js)**